

### **BAB III**

#### **DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP TIONGKOK DALAM KASUS**

##### **SAMADIKUN HARTONO**

Hubungan Indonesia dan Tiongkok dewasa ini telah menjadi pembahasan yang cukup menarik bagi para akademisi nasional maupun internasional. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh perubahan politik luar negeri Indonesia yang dapat dikatakan lebih dekat dan banyak menjalin kerjasama dengan Tiongkok. Jika dibandingkan dengan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia terkesan lebih condong terhadap praktek politik luar negeri yang umum (selalu berusaha untuk membina hubungan kerjasama yang netral dengan banyak negara) meskipun dalam prakteknya jika terkait masalah dalam hal pembangunan infrastruktur dalam negeri, Jepang menjadi negara tujuan utama dalam hal kerjasama pembangunan infrastruktur.

Kedekatan hubungan kerjasama Indonesia- Tiongkok tentunya tidak hanya berdampak dalam hal ekonomi namun juga dalam berbagai bidang dan salah satunya ialah dalam bidang keamanan terkait kejahatan internasional. Sebelum penulis membahas diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Tiongkok dalam kasus Samadikun Hartono, berikut beberapa penjelasan terkait politik luar negeri Indonesia –Tiongkok di era kepemimpinan Jokowi secara umum.

## **1. Politik Luar Negeri Indonesia dengan Tiongkok era Jokowi**

Berbicara tentang politik luar negeri Indonesia, secara umum prinsip politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia adalah ‘bebas dan aktif’ yang telah di rumuskan oleh Bung Hatta dan tertulis dalam bukunya yang berjudul *Mendayung antara Dua Karang*. Hingga saat ini prinsip politik luar negeri bebas aktif masih tetap dipakai dalam praktek diplomasi pemerintah Indonesia. Dampak positif dari penggunaan prinsip ini adalah terjalinnya hubungan luar negeri yang baik dan tidak memihak pada salah satu pihak atau kubu yang berkonflik sehingga Indonesia dapat meminimalisir konflik dengan negara lain.

Salah satu negara yang masih membina hubungan baik dengan Indonesia sejak awal kemerdekaan adalah Tiongkok, perbedaan ideologi yang dianut kedua negara tidak menjadi hambatan berarti bagi hubungan Indonesia –Tiongkok dewasa ini. Di era pemerintahan presiden Jokowi, Indonesia memiliki hubungan luar negeri yang cukup dekat dengan Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai macam bentuk kerjasama terutama di bidang ekonomi dan investasi. Disisi lain dalam upayanya untuk menjadi negara *superpower*, Tiongkok juga memerlukan dukungan dari negara-negara lain dan salah satunya adalah Indonesia.

Menurut Yan Xuetong, salah seorang akademisi Tiongkok, dalam proses kebangkitan Tiongkok setidaknya ada tiga alasan yang diperlukan terkait kebijakan yang baik dalam bertetangga dengan negara lain terutama dalam hal diplomasi. Alasan pertama agar Tiongkok bisa menjadi negara yang memiliki

kekuatan global, hal pertama yang diperlukan ialah bangkit menjadi kekuatan regional. Alasan yang kedua ialah ketika Amerika ingin menghalangi kebangkitan Tiongkok, kebijakan negara tetangga yang baik akan menolong Tiongkok untuk mengumpulkan dukungan yang diperlukan untuk mengimbangi tekanan. Alasan yang terakhir, kebijakan negara tetangga yang baik akan menolong Tiongkok untuk menentramkan tetangga atau negara lain tentang kebijakan Tiongkok. Negara yang memiliki investasi besar dari Tiongkok pada *'Belt and Road Initiative'* (BRI) adalah ilustrasi terbaik dari kepentingan negara tetangga dari Tiongkok (Pradhan, 2016).

Kedekatan Indonesia-Tiongkok dimasa pemerintahan Presiden Jokowi sudah mulai terlihat sejak awal pemerintahannya, di awal masa jabatannya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mengatakan bahwa ada tiga istilah penting dalam diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Tiga istilah penting tersebut antara lain; tegas dan bermartabat, pro rakyat dan membumi, dan yang terakhir ialah tidak berjarak dengan kepentingan rakyat. Kemudian terkait hubungan kerjasama dengan Tiongkok, terdapat tiga sektor kerjasama antara Indonesia- Tiongkok yang perlu untuk dilanjutkan daripada merubah pola hubungan kerjasama kedua negara dimasa yang akan datang. Sektor yang pertama adalah kerja sama maritim, kerjasama yang kedua adalah kerjasama mengelola stabilitas kawasan dan yang ketiga adalah kerjasama dalam peningkatan hubungan antarwarga kedua negara (Lalisang, 2014).

Pada bulan Maret 2015, presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraannya pertamanya ke Tiongkok dan salah satu agenda yang dilakukan

Presiden Jokowi adalah dengan menghadiri *Boao Forum for Asia* yang diselenggarakan di Provinsi Hainan, Tiongkok Selatan. Selama pertemuan, presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping sepakat untuk menandatangani rencana lima tahun kemitraan. Dalam kunjungannya ini Tiongkok dan Indonesia sepakat untuk memperkuat strategi dan komunikasi kebijakan, memajukan konektivitas infrastruktur maritim, memperdalam kerjasama dalam investasi industri dan konstruksi proyek besar, dan meningkatkan kerjasama praktis untuk mengembangkan "kemitraan maritim" bersama-sama. Dalam salah satu harian Tiongkok yaitu *Xinhua*, presiden Xi juga mengatakan bahwa "*China dan Indonesia saling bergantung secara strategis dan melengkapi secara ekonomis antara satu sama lain. Selain itu ada potensi besar untuk kerjasama timbal balik antara kedua negara,*" (Siti Ruqoyah; Tasya Paramitha, 2015).

Dalam kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok, kedua negara memiliki tujuan yang hampir sama dan diharapkan akan saling memberikan dampak positif. Hal ini dapat terlihat dari persamaan antara Indonesia –Tiongkok terkait isu maritim dimana adanya visi Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan disisi lain hal ini juga sebangun dengan rencana pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, yang ingin membangun Jalan Sutra Maritim Baru (*New Maritime Silk Road*).

Sedikit menyinggung tentang visi presiden Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, setidaknya ada lima pilar ilustrasi dari presiden Jokowi, antara lain;

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia
2. Memelihara dan mengelola sumber daya laut,
3. Memberikan prioritas terhadap pengembangan infrastruktur kelautan dan penghubung di sepanjang perairan jawa
4. Mencari kerjasama dengan negara lain dalam bidang kelautan dan menghapus berbagai macam sumber konflik di laut seperti penangkapan ikan secara ilegal dan permasalahan terkait wilayah perairan
5. Mengembangkan kekuatan maritim Indonesia (Pradhan, *China's Maritime Silk Route and Indonesia's Global Maritime Fulcrum: Complements and Contradictions*, 2016).

Terkait pembangunan Jalan Sutra Maritim Baru (*New Maritime Silk Road*) yang dicanangkan Tiongkok, hal ini didasari atas kebangkitan kembali rute laut tradisional yang berangkat dari penjelajahan Zheng He di era dinasti Ming pada abad 15 lalu.

Dalam pidatonya di kementerian luar negeri Indonesia pada tahun 2015 lalu, duta besar Tiongkok menegaskan bahwa terdapat keuntungan dalam kerjasama antara Indonesia- Tiongkok di bidang maritim. Menurutnya, bagi Tiongkok Indonesia adalah bagian penting dari program Jalan Sutra Maritim Baru (*New Maritime Silk Road*) sama seperti Indonesia yang memiliki keuntungan dalam hal sumberdaya, pasar, tenaga kerja dan geografi.

Sektor yang kedua terkait pengembangan hubungan kerjasama dalam mengelola stabilitas kawasan antara Indonesia- Tiongkok, dapat terlihat dari isu laut Cina Selatan yang hingga saat ini masih terus berlangsung dan belum memiliki kesepakatan resmi antar negara yang bersengketa setelah penandatanganan Deklarasi Tata Perilaku (Declaration of Conduct of Parties) pada 2002. Dalam kunjungan pembicaraan dengan Presiden Xi pada Maret 2015 lalu, Presiden Jokowi berencana menawarkan diri untuk membantu penyelesaian sengketa perbatasan laut Cina Selatan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi "*honest broker*" antara Cina dengan negara-negara Asia Tenggara yang bersengketa. Pernyataan Presiden Jokowi ini dimuat dalam halaman A3, *South China Morning Post*, yang menulis *Diplomacy: Indonesia 'can Act as broker over South China Sea'* (Diplomasi: Indonesia "Bisa Menjadi Penghubung Dalam Sengketa Laut China Selatan").

Pernyataan Presiden Jokowi yang akan menjadi "perantara tulus" dalam penyelesaian sengketa batas laut Cina Selatan, merupakan peran politik luar negeri yang baru. Peran ini ditawarkan Presiden Jokowi karena Indonesia bukan pihak yang bersengketa dalam kasus batas laut Cina Selatan (Sekretariat Kabinet RI PresidenRI.go.id ©, 2015). Dalam salah satu media massa Jepang menuliskan bahwa Indonesia telah berinisiasi untuk menjadi penengah terkait perselisihan teritorial negara-negara di perairan laut Cina Selatan. Dalam kunjungan ke Jepang, Presiden Jokowi mengatakan bahwa "*We need peace and stability in the Asia-Pacific region. It is important to have political and security stability to build up our economic growth,*". Jokowi kemudian menambahkan bahwa Indonesia

mendukung *Code of Conduct* (Laut Cina Selatan) dan juga dialog antara Tiongkok dan Jepang - Tiongkok dan ASEAN (straitstimes.com, 2015).

Inisiasi Indonesia untuk menjadi perantara diantara kubu yang berkonflik dibuktikan dengan terus melakukan upaya negosiasi dan kesepakatan *Code of Conduct* (COC). Pada 24 April 2016 lalu, Ketua Delegasi RI pada Pertemuan ke-11 *Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM on DOC)* mengatakan bahwa "*Indonesia bukan merupakan claimant state dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan, tetapi sudah menjadi tanggung jawab kami dan seluruh negara-negara di kawasan untuk selalu menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan ini, termasuk Laut China Selatan. Semakin besar masalahnya, semakin besar pula tanggung jawab tersebut.*"

Dalam pertemuan ini, disampaikan pula bahwa implementasi DOC secara penuh dan efektif serta finalisasi COC sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan laut China Selatan. DOC dinilai sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan dan mencegah konflik di kawasan yang akan berdampak negatif terhadap perekonomian kawasan dan dunia. Indonesia menegaskan bahwa ASEAN dan Tiongkok perlu berangkat dari kepentingan yang sama dalam menangani keamanan dan keselamatan maritim, kebebasan navigasi dan *overflight*, non-militerisasi dan *exercise of self-restraint* di kawasan tersebut (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2016).

Pembahasan terkait isu Laut Cina Selatan juga dilakukan ddalam KTT ASEAN pada 29 April 2017 lalu. Dalam pertemuan ini, presiden Jokowi mengatakan bahwa *"Indonesia mengajak Republik Rakyat Tiongkok untuk terus memberikan kontribusi bagi stabilitas dan perdamaian di Laut Tiongkok Selatan,"*. Menurutnya permasalahan yang terjadi di perairan itu perlu pembahasan mendalam (Nugroho, 2017). Pada KTT ASEAN yang diselenggarakan di Manila, April lalu tidak terdapat kritik terhadap Tiongkok. Keengganan untuk mengkritik Tiongkok menunjukkan dampak negosiasi agresif Beijing dengan masing-masing negara Asia Tenggara dan tawaran bantuan ekonomi sejak keputusan arbitrase pada 12 Juli lalu (KTT ASEAN Hindari Kritik Terhadap China, 2017).

Bagi Tiongkok, dengan mempertinggi hubungan dengan Indonesia akan membuat Tiongkok memiliki aliansi yang dibutuhkan di ASEAN yang akan memperkuat hubungan Tiongkok dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya dan dapat membantu Tiongkok menenangkan tetangga ASEAN terkait kebangkitan Tiongkok. Indonesia dapat membuktikan sebagai sekutu yang berharga dengan menjadi pendukung dari suatu kebijakan tidak memihak terutama kedekatan dengan Amerika (Ibid).

Pengembangan kerjasama Indonesia-Tiongkok di sektor yang ketiga adalah kerja sama peningkatan hubungan antarwarga. Hal ini mengisyaratkan bahwa hubungan antarwarga kedua negara akan sangat menentukan dinamika hubungan Indonesia-Tiongkok. Interaksi antarwarga yang dimaksud bukanlah



dalam arti sempit, arus masuk-keluar wisatawan setiap negara, melainkan seluas-luasnya hingga mencakup beragam kalangan, termasuk akademisi, seniman, budayawan, dan kelompok-kelompok agama. Guna mempermudah arus masuk-keluar wisatawan, pemerintah Indonesia telah meminta Pemerintah Tiongkok untuk memberikan fasilitas bebas visa bagi wisatawan Indonesia yang akan berkunjung ke Tiongkok sebagaimana Pemerintah Indonesia telah memberikan visa bebas untuk wisatawan Tiongkok yang akan bepergian ke Indonesia (Yulianingsih, 2015)

Wakil Perdana Menteri Tiongkok, Madam Liu Yandong dalam kunjungannya menindaklanjuti kerja sama kedua negara pada 27 Mei 2015 lalu mengatakan hubungan kerja sama bilateral dengan Indonesia di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah yang terbaik. Madam Liu Yandong kembali mengatakan bahwa *"Pada Oktober 2013 ketika Presiden Tiongkok dilantik, beliau melakukan kunjungan ke Indonesia yang merupakan negara pertama rangkaian di Asia. Begitu juga saat era Presiden Jokowi yang sudah dua kali berkunjung ke China. Lalu juga dua kepala negara kita telah beberapa kali bertemu dalam konferensi multilateral. Boleh dikatakan ini hubungan paling baik sepanjang sejarah. Tak hanya pengaruhi regional tetapi internasional,"* (Viridhani, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, kedekatan Indonesia dan Tiongkok tidak hanya berfokus pada masalah kerjasama ekonomi namun tidak dapat dipungkiri bahwa melalui kerjasama ekonomi hubungan kedua negara menjadi semakin erat dan berdampak positif pada kerjasama di bidang lainnya.

## **2. Diplomasi Jokowi terkait Buronan Korupsi Samadikun Hartono**

Dalam berbagai macam konferensi pers ataupun pernyataan yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok terkait hubungan kerjasama dengan Indonesia. Umumnya pemerintah Tiongkok selalu mengatakan bahwa kerjasama ini selalu berdasarkan kerjasama timbal balik antar kedua negara. Banyaknya kerjasama yang telah terjalin terutama dalam bidang ekonomi, investasi dan pembangunan infrastruktur yang sudah terjalin tentu Tiongkok tidak akan membuat Tiongkok keberatan jika pemerintah Indonesia mengajukan permintaan kerjasama dan penyerahan buronan korupsi Indonesia yang bersembunyi di Tiongkok, dan salah satu diantaranya adalah Samadikun Hartono. Buronan korupsi BLBI yang telah lama buron ini diketahui aparat Indonesia sering keluar masuk Tiongkok.

Pada tahun 2015 lalu dilakukan pertemuan bilateral sekaligus mengahadiri peringatan 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok di Beijing, Presiden Jokowi juga memanfaatkan pertemuan ini untuk mengajak Tiongkok bekerjasama dalam memberantas Korupsi. Hasil dari pertemuan ini adalah Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk meningkatkan kerja sama hukum untuk mengejar buronan koruptor Indonesia yang diduga masih berada di beberapa wilayah di Cina, Hong Kong dan Makau. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkum) saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan, *"Jika ada buronan kita yang sudah berkekuatan hukum tetap maka*

*pihak Tiongkok dapat segera memproses dan mengembalikannya kepada Pemerintah Indonesia," (Utami, 2016).*

Sejak awal masa pemerintahannya, presiden Jokowi sering mengajak berbagai negara bekerjasama dalam memberantas korupsi, hal ini sering disinggung Jokowi dalam berbagai forum internasional. Disatu sisi, selama ini Tiongkok dibawah pemerintahan Xi Jinping dikenal sebagai negara yang begitu serius memerangi korupsi. Perang melawan korupsi tidak hanya dilakukan didalam negeri namun Tiongkok juga gencar menggalakan kerjasama melawan korupsi dalam berbagai forum internasional, dan salah satunya adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Memanfaatkan keanggotaan dalam G-20, Indonesia semakin mudah melakukan negosiasi dengan Tiongkok terkait kerjasama dalam isu korupsi.

Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Tiongkok tahun 2016 lalu, Jokowi mengatakan bahwa *"I believe that G20 [countries] must also strengthen ties in anti-corruption efforts,"*. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia dapat dijadikan contoh oleh negara-negara anggota G20 sebagai negara yang aktif dalam memerangi korupsi. Topik terkait anti korupsi telah menjadi pembahasan dalam forum G20 sejak beberapa tahun terakhir. Sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada tahun 2016 lalu, Tiongkok mencoba untuk membawa semangat anti korupsi internasional di level yang lebi tinggi (Istman, 2016). .

Bentuk kerjasama terkait perang melawan korupsi dalam forum G20 adalah dengan membuat *The G20 Anti-Corruption Action Plan*. Dalam *The G20 Anti-Corruption Action Plan*, negara-negara anggota G20 diharapkan dapat bekerjasama dalam menjalankan pembuatan perayuran undang-undang anti korupsi, anti money laundering lintas negara dan pemngembalian aset negara yang telah dicuri. Ha ini merupakan upaya baru untuk meniadakan tempat persembunyian bagi para koruptor yang melarikan diri ke negara lain dengan berkolaborasi dibawah Presiden Tiongkok (Murphy, 2016) .

Dalam beberapa tahun ini, Tiongkok telah bekerjasama dalam upaya pemberantasan korupsi dengan 89 negara di dunia dan diantaranya adalah dengan Indonesia. Indonesia dan Tiongkok saat ini telah berhasil menandatangani 44 perjanjian ekstradisi dan 54 perjanjian bantuan pidana dan peraturan (*Ibid*).

Penangkapan dan pemulangan Samadikun Hartono, dapat dikatakan sebagai hasil dari diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Tiongkok terkait kerjasama pemberantasan korupsi. Meskipun dalam prakteknya diperlukan proses yang cukup panjang hingga pada akhirnya Samadikun Hartono dapat dipulangkan ke Indonesia, langkah presiden Jokowi untuk membahas kerjasama korupsi dalam berbagai pertemuan bilateral maupun forum Internasional telah menjadi langkah awal dalam proses penangkapan dan pemulangan Samadikun Hartono.

Kerjasama antara Indonesia -Tiongkok terkait kasus korupsi selama ini sudah dilakukan berdasarkan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Namun dengan terus melakukan berbagai koordinasi dan pembenahan

perjanjian akan membuat kerjasama dalam bidang ini semakin mudah dilakukan dimasa yan akan datang. Salah satu contoh hasil kerjasama timbal balik yang dilakukan Indonesia-Tiongkok adalah ditangkap dan dipulangkannya buron Samadikun Hartono dan di satu sisi pemerintah Indonesia juga akan melakukan hal yang sama jika ada buronan Tiongkok yang terlacak di Indonesia. Sebagai contoh pemerintah Indonesia telah menyerahkan kepada aparat Tiongkok 6 orang buronan warga negara Tiongkok pada Desember 2016 lalu (Yunjing, 2016).